

## Permudah Warga Pencari Kerja, Pemprov DKI Sediakan Laman *Jaknaker.id*

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menyediakan laman (website) khusus *Jaknaker.id* untuk memfasilitasi warga yang ingin mencari informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan kerja. Laman itu dibuat guna memudahkan warga mencari info yang lengkap tentang program pelatihan kerja yang disediakan Pemprov DKI.

"Kita ada *Jaknaker.id*. Itu adalah website yang disediakan untuk warga yang mencari pelatihan kerja, pencari lowongan kerja bahkan untuk perusahaan pencari kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah saat ditemui dalam kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (21/7).

Dalam laman tersebut, pemerintah menyediakan informasi tentang 29 cabang pelatihan kerja yang bisa diikuti oleh warga. Beberapa

cabang pelatihan kerja itu antara lain pelatih membuat kue kering dan kue basah, pelatihan jadi bartender, menjadi satpam, hingga pelatihan mendapatkan surat izin mengemudi (SIM A).

Laman tersebut juga menyediakan tata cara mendaftar ke beberapa program pelatihan kerja. Bukan hanya untuk pencari kerja saja, laman itu juga bisa membantu perusahaan mencari pegawai yang dibutuhkan.

"Itu juga membantu para pekerja juga, misalkan saya mau mencari pekerja dengan kualifikasi A, ingin cari pekerja dengan kualifikasi B. Jadi ada kolaborasi di sana," kata Andri.

Dengan adanya laman tersebut, Andri berharap warga bisa menggeluti pelatih sesuai dengan minatnya. Sehingga mereka bisa memiliki kemampuan untuk bisa diampung di perusahaan yang tepat. ● yan

## Tiga Tersangka Mafia Tanah di Cipayung Ditahan

JAKARTA (IM) - Tiga tersangka diduga mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur, ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiganya ialah mantan Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan DKI Jakarta berinisial HHI, seorang Notaris LD, dan pihak swasta berinisial MITI.

"Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).

Penahanan terhadap pejabat DKI serta dua tersangka kasus lainnya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 20 Juli 2022.

Ketiga tersangka ditahan oleh penyidik Seksi Pidana Khusus Kejati DKI karena ancaman hukuman pidana penjaranya di atas lima tahun.

Selain itu penyidik juga khawatir para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi.

Sebelumnya, Ashari menjelaskan bahwa tersangka HH adalah Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta pada 2018 melaksanakan pembebasan lahan di RT/RW 008/03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, dan Peta Informasi Rencana Kota dari

Dinas Tata Kota. "Serta Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), dan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Selain 3 tersangka itu, Kejati DKI juga telah menetapkan pihak swasta lain berinisial JF sebagai tersangka. Peran JF adalah bekerja sama dengan LD membebaskan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung itu.

Pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Rp1,6 juta per meter persegi. Padahal Dinas Kehutanan DKI Jakarta membayar lahan itu Rp2,7 juta per meter persegi. Total pembelian tanah di Cipayung itu mencapai Rp46.499.550.000.

"Total uang yang diterima pemilik lahan hanya Rp28.729.340.317, sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan para pihak Rp17.770.209.683," ujar Ashari.

Kejati DKI menjerat tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Cipayung JF dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● yan

## GERUDUK KANTOR WALI KOTA JAKARTA UTARA

## Warga Minta Pelanggar RTH di Penjaringan Diproses

JAKARTA (IM) - Unjuk rasa warga Kelurahan Kapuk Kamal, Penjaringan, digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Mereka meminta adanya dugaan berbagai pelanggaran, seperti ruang terbuka hijau (RTH) oleh PT BMKU diproses.

Pasalnya, laporan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tidak kunjung ditindak lanjuti. Warga yang tergabung dalam Barisan Rakyat Menggugat Bajarmarga (BRMB), menyebut bukan kali pertama mereka berunjuk rasa.

Koordinator Aksi, Dulamin Zhigo mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sudah keempat kalinya. Pihaknya menuntut keadilan bagi masyarakat di antaranya hak untuk mendapat ruang terbuka hijau.

"Berdasarkan sate plan nya lahan tersebut warna hijau yang artinya untuk ruang terbuka hijau karena hak masyarakat mendapat udara bersih sejuk dan tidak boleh ada aktivitas industry di sana," ujar Dulamin Zhigo, Kamis (21/7).

"Yang makin terlihat jelasnya lagi, PT BMKU sudah melanggar buffer zone (batas penyangga) Tol Prof. Sedyatmo-Bandara. Akibatnya, jalan bebas hambatan di sana sering mengalami

banjir," sambungnya.

Dulamin Zhigo mengungkap pihaknya sudah membuat laporan aduan resmi kepada Polres Metro Jakarta Utara guna menindakan ini langkah konkrit pihaknya mencari keadilan.

"Kami menduga kuat, izinnnya bermasalah dan dampaknya semakin buruk bahwa pemerintah representasi negara mengalami kerugian karena pasti urusan pajaknya bermasalah dan diduga dimanipulasi," pungkasnya.

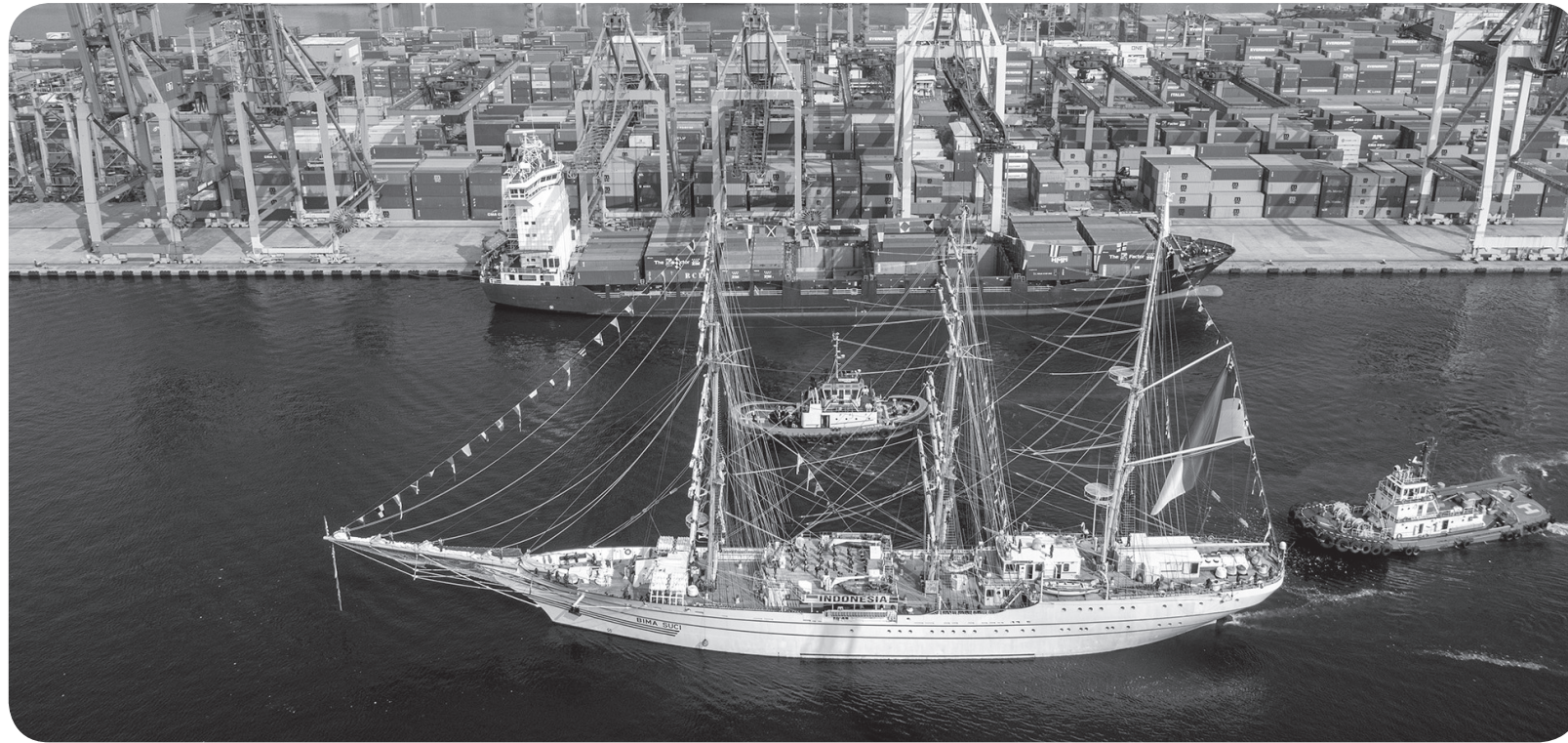
Senada, Koordinator Aksi lainnya Ubaedillah Ubed menegaskan bahwa perusahaan ini sudah jelas melanggar hukum terkait tata ruang. Ia menuturkan pelanggaran tata ruang yang dilakukan PT BMKU bukan sebatas dugaan lagi. Namun itu merupakan bentuk kejelasan pelanggaran hukum.

Pihaknya berharap, Pemerintah DKI Jakarta dan aparat penegak hukum tidak masuk angin menindak tegas pengusaha curang seperti PT BMKU di Penjaringan Jakarta Utara.

"Kami dari Barisan Rakyat Menggugat Bajarmarga akan terus melakukan unjuk rasa dan upaya lainnya yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum," tandasnya. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## KRI BIMA SUCI SANDAR DI JAKARTA

KRI Bima Suci-945 bersiap sandar di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/7). KRI Bima Suci-945 akan bersandar selama tiga hari di Jakarta untuk melaksanakan sejumlah kegiatan dalam mendukung Latihan Praktek (Lattek) Kartika Jala Krida (KJK) 2022.

# Wagub DKI: Aturan Ubah Jam Kerja tak Bisa Diputuskan Sepihak

Usulan mengubah jam kerja tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Pemprov, karena menyangkut banyak hal. Tidak hanya pemerintahan di Pemprov tetapi juga pemerintahan lainnya, maupun swasta. Perlu kerja sama semua dan juga dukungan Pemerintah Pusat, ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara seputar wacana aturan keberangkatan jam kerja untuk meminimalisir kemacetan di Ibu Kota. Menurutnya, perlu ada diskusi lebih lanjut antara Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dengan Polda Metro Jaya.

"Usulan itu kan tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh

Pemprov. Itu kan menyangkut banyak hal, tidak hanya pemerintahan di Pemprov tetapi juga pemerintahan lainnya, swasta, ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua. Kebijakan ini juga perlu dukungan Pemerintah Pusat," ucap Ariza kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

## Pemprov DKI Buka Kesempatan Latihan Kerja bagi Karyawan Holywings

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan kepada 3.000 karyawan Holywings yang kehilangan pekerjaan untuk ikut program pelatihan kerja.

"Kita pasti sangat terbuka untuk mereka. Selama mereka mempunyai KTP DKI yang pasti kita layani," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi) DKI Jakarta, Andri Yansyah, di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (21/7).

Andri menyatakan sudah menyediakan 29 cabang pelatihan pekerjaan untuk warga yang mau menjadi tenaga profesional dan pengusaha. "Kita siapkan 29 pelatihan. Ada salon, ada memasak, ada makanan kekinian, ada barista," kata dia.

Ke-29 cabang keahlian itu digelar di setiap Suku Disnakertrans dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD). Warga yang mau mendaftar pun bisa langsung mendatangi pihak sudin yang ada di setiap

kecamatan dan kelurahan di masing-masing wilayah.

Pekerja juga bisa memilih cabang pelatihan pekerjaan tersebut melalui beberapa saluran informasi, salah satunya melalui website *Jaknaker.id*. Walau sudah membuka kesempatan tersebut, Andri Yansyah mengaku belum menerima aduan terkait keberlangsungan mantan karyawan Holywings tersebut.

"Sampai dengan saat ini belum ada pengaduan baik yang dilaporkan oleh direksi maupun pekerjanya," jelas dia.

Sebelumnya, pada Selasa (28/6) Satpol PP DKI Jakarta menuntun 12 gerai Holywings serentak di Jakarta dengan dasar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penutupan itu dilakukan atas permintaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) DKI atas rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM DKI.

Dari hasil penelitian dan

"Nanti masalah ini kita diskusikan. Dari Dishub, Polda selalu melakukan evaluasi terkait masalah transportasi, kemacetan di Jakarta," imbuhnya.

Ariza mengatakan, Pemprov DKI terus berupaya menyusun perencanaan yang komprehensif program-program terkait lalu lintas. Ia pun pamer sejumlah pembenahan terkait pembenahan sektor transportasi.

"Terkait pengendalian transportasi Jakarta, lalu lintas, teman-teman lihat berapa peningkatannya, peningkatan sudah lebih dari 1 juta orang yang gunakan Transjakarta dan sebagainya transportasi makin baik, jalur sepeda, kemudian juga trotoar, jalan, jembatan, semua kita perbaiki, integrasi moda transportasi, bahkan juga ticketing, Jalinkgo semua semakin baik," tuturnya.

Sebelumnya, Dirlantas

Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, akan siapkan sejumlah program agar dapat mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satunya penerapan jam kerja berangkat pekerja.

Hal itu dikarenakan supaya tidak menumpuk pada jam

yang sama. Usulan ini berangkat dari hasil analisisnya terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan pagi hari.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan. Hal ini mengakibatkan kemacetan di jalan. ● yan

## Pemprov DKI Bentuk Satgas untuk Bahas Izin Operasional ACT

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah membentuk satgas atau tim khusus untuk mengkaji lebih lanjut masalah izin Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Itu masih dalam pembahasan, sudah dibentuk satgas ya. Udak bikin timnya pengawasan, pengecekan," ungkap Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/7).

Menurut Riza Satgas sudah mulai bekerja. Ia mengatakan hasil kerja satgas juga sebentar lagi rampung.

"Eenggak (lama) sebentar lagi (selesai)," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengevaluasi izin kegiatan beroperasi ACT seiring kirsur dugaan penyelewengan dana donasi. ACT memiliki izin kegiatan beroperasi yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan berlaku hingga 2024.

Sementara itu Kementerian Sosial telah mencabut izin ACT dalam Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Pencabutan izin ACT tertantum dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, 5 Juli 2022.

Dengan pencabutan itu ACT tak bisa lagi melakukan kegiatan pengumpulan uang. Namun Kemensos menyatakan ACT masih bisa melakukan kegiatan lain kecuali pengumpulan uang. ● yan

## Pemkot Jakpus Larang 'Citayam Fashion Week' di Zebra Cross

JAKARTA (IM) - Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi melarang adanya kegiatan aksi peragaan busana di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, atau yang terkenal dengan istilah "Citayam Fashion Week".

"Jangan bikin acara catwalk-nya di zebra cross (penyeberangan jalan), mohon untuk patuhi aturan-aturan memakai jalan dan bantu pengguna jalan lainnya, ada pengguna jalan yang jadi terganggu," kata Irwandi saat dihubungi wartawan, Kamis (21/7).

Menurut Irwandi, ia tidak melarang masyarakat untuk berkunjung dan meramaikan kawasan Dukuh Atas. Namun, dengan syarat tetap patuhi peraturan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. "Kami Jakarta tidak tertutup dengan pendatang, silakan mereka memanfaatkan.

Gubernur (Anies Baswedan) juga bilang silakan pakai, tapi sesuai dengan ketentuan," kata dia. Irwandi telah mengerahkan petugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan Dukuh Atas.

"Kami sudah turunkan pengawas, jadi mereka nggak boleh berkerumun karena Covid-19 masih jadi saya berharap mereka tertib protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengimbau kepada para remaja yang berkunjung ke Dukuh Atas agar selalu mematuhi aturan jam malam

sehingga kejadian remaja tidur hingga larut pagi tidak terulang kembali. "Eenggak boleh ada yang nginep tidur di situ, kalau bisa kami minta jam 22.00 WIB mereka sudah nggak ada di lokasi (Dukuh Atas)," tutur Irwandi.

Sebagai informasi, rombongan remaja asal Citayam, Bojonegara dan sekitarnya belakangan menyita perhatian publik. Mereka kerap menongkrong sembari membuat konten media sosial Tiktok di sekitar taman Stasiun MRT Dukuh Atas, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Melati, Muhammad Alfarabi mengatakan, anak-anak itu mengetahui tempat nongkrong di Stasiun MRT Dukuh Atas karena mereka dulu pernah tinggal di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. ● yan



## UNJUK RASA YOUTH20OCCUPY DI JAKARTA

Massa berunjuk rasa dengan tajuk "Pawai Youth20occupy: Voice of The Future" di Jakarta, Kamis (21/7). Unjuk rasa yang diikuti oleh anak-anak muda se-Pulau Jawa itu untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap dampak krisis iklim.

FOTO: ANT

## PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Diumumkan bahwa PT. Sadhana Makmur Sejahtera ("Perseroan") sesuai akta tanggal 18 Juli 2022 No. 05 dibuat dihadapan Julius Caesar Barito, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang telah diputuskan untuk dibubarkan. Kepada para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likuidator Perseroan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini berdasarkan Pasal 147 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Juli 2022  
Jl. Daan Mogot KM. 13 No. 57  
Cengkareng Timur, Cengkareng,  
Jakarta Barat  
Up : Indrawijaya Soenardi  
(Likuidator)